

**FUNGSI DAN KEDUDUKAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH
NOTARIS SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG JABATAN
NOTARIS NOMOR 30 TAHUN 2004**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister
Program Magister Kenotariatan**



Oleh :

ANNA SARI DEWI

S 351208004

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2016

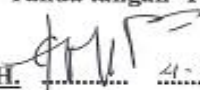

**FUNGSI DAN KEDUDUKAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH
NOTARIS SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG
JABATAN NOTARIS NOMOR 30 TAHUN 2004**

DISUSUN OLEH:

ANNA SARI DEWI

NIM : S351208004

**Telah disetujui oleh Tim Pembimbing
Dewan Pembimbing**

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
1. Pembimbing I	<u>Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.</u> NIP : 19630209 198803 1 003		4-2-2016
2. Pembimbing II	<u>Pranoto, S.H., M.H.</u> NIP : 19641219 198903 1 002		4-2-2016

Mengetahui :

Kepala Prodi Studi Magister Kenotariatan



Burhanudin Harahap, S.H., M.H., MSI., Ph. D

NIP : 19601107 198601 1 001

**FUNGSI DAN KEDUDUKAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH
NOTARIS SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG
JABATAN NOTARIS NOMOR 30 TAHUN 2004**

DISUSUN OLEH

ANNA SARI DEWI

NIM : S351208004

Telah disetujui oleh tim penguji :

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
1. Ketua	: <u>Burhanudin H, S.H., M.H., MSI., Ph.D</u> NIP.19600716198503 1 004		5/2-2016
2. Sekretaris	: <u>Prof. Dr. Adi Sulistivono, S.H., M.H</u> NIP.19630209 198803 1 003		4/2-2016
3. Penguji	: <u>Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum</u> Pembanding NIP. 19641201 200501 1 001 Internal		7-2016
4. Penguji	: <u>Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn</u> Pembanding Eksternal		5/2-2016
5. Anggota	: <u>Pranoto, S.H., M.H</u> NIP. 19641219 198903 1 002		4/2-2016

Mengetahui



Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah., M.Pd
NIP.19600727 198702 1 001

Kepala Program Studi
Magister Kenotariatan

Burhanudin H.S.H., M.H., MSI., Ph.D
NIP. 19600716 198503 1 00

PERNYATAAN

NAMA : ANNA SARI DEWI

NIM : S351208004

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul “ FUNGSI DAN KEDUDUKAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS NOMOR 30 TAHUN 2004” adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan karya saya, dalam tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut diatas tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, yang berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Surakarta, 9 Februari 2016

Yang membuat pernyataan

Anna Sari Dewi

MOTTO

**” DIBALIK KESULITAN AKAN ADA KEMUDAHAN, DIBALIK
KESEDIHAN PASTI TELAH MENANTI KEBAHAGIAAN, IKHLAS,
SABAR DAN TAWAKAL ADALAH TEMAN HIDUPKU”**

Penulisan hukum ini kupersembahkan untuk:

- **Ibuku tercinta yang dengan ketulusan hatinya begitu sabar mengingatkanku untuk selalu semangat dalam menyelesaikan study ini.**
- **Untuk anakku Ardha, semangat selalu anakku sayang, mama selalu ada untukmu.**
- **Juga untuk keluargaku, suami dan anak-anakku tercinta semoga kita akan selalu hidup bahagia selamanya.**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan segenap kemampuan yang ada. Adapun judul tesis ini adalah **“FUNGSI DAN KEDUDUKAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS NOMOR 30 TAHUN 2004**

Tesis ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Universitas Sebelas Maret Surakarta. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS, selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta
2. Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, MS, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Prof. Dr. Supanto, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Burhanudin Harahap, S.H, M.H, M.Si, Ph.D, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Segenap Dosen Pengajar Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H, selaku pembimbing tesis yang telah memberikan waktu, tenaga, bimbingan dan memberikan berbagai masukan serta saran dalam menyusun tesis.
7. Pranoto, S.H., M.H, selaku pembimbing tesis yang telah memberikan waktu, tenaga, bimbingan dan memberikan berbagai masukan serta saran dalam menyusun tesis.

8. Bapak Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn.yang telah meberikan waktu, tenaga, bimbingan dan memberikan berbagai masukan serta saran dalam menyusun tesis ini
9. Segenap Dosen Pengajar Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis
10. Seluruh staf administrasi S2 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah membantukelancaran perkuliahan.
11. Ibu tercinta yang selalu memberikan semangat dan doronganuntuk keberhasilan penulisan tesis ini.
12. Suami dan anak-anak tercinta yang selalu menjadi penyemangat dalam penyelesaian tesis ini
13. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan di Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang selalu memberi motivasi dan dorongan untuk keberhasilan penulisan tesis ini
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik langsung maupun tidak langsung selama menyelesaikan tesis ini.

Demikian segala kerendahan hati penulis mengharapkan kepada para pembaca untuk dapat memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dimana nantinya akan dapat penulis pergunakan sebagai penyempurnaan dalam penulisan tulisan selanjutnya. Akhirnya penulis berharap semoga dengan adanya tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Surakarta, 5 Februari 2016

Penulis

ANNA SARI DEWI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii

BAB I. PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah.....	17
C.Tujuan Penelitian.....	18
D.Manfaat Penelitian.....	19

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....

A. Landasan Teori.....	21
1. Tinjauan Umum Mengenai Jabatan Notaris.....	21
a. Pengertian Jabatan Notaris.....	21
b. Pengaturan Jabatan Notaris.....	24
2. Asas Hukum Peraturan Perundang Undangan.....	25
3. Notaris.....	28
a. Pengertian Notaris.....	28
b. Kewenangan Notaris.....	29
c. Kewajiban Notaris.....	30
d. Larangan Notaris.....	32
e. Pengangkatan Notaris.....	33

f. Pemberhentian Notaris.....	34
4. Tinjauan Umum Mengenai Kode Etik Notaris.....	36
a. Kode Etik Notaris.....	36
5. Tinjauan Umum Mengenai Majelis Pengawas daerah Notaris.....	39
a. Tujuan dan Fungsi Pengawasan.....	39
b. Majelis Pengawas Daerah Notaris.....	43
c. Pengertian Majelis Pengawas Daerah Notaris.....	46
d. Kewenangan dan Kewajiban Majelis Pengawas Daerah Notaris.....	48
e. Pengangkatan Majelis Pengawas Daerah Notaris.....	50
f. Pemberhentian Majelis Pengawas Daerah Notaris.....	51
g. Susunan Organisasi Majelis Pengawas Daerah Notaris.....	52
h. Tata Kerja Majelis Pengawas Daerah Notaris.....	54
i. Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Notaris.....	57
6. Tinjauan Umum Tentang Majelis Kehormatan Notaris.....	61
a. Pengertian Majelis Kehormatan Notaris.....	62
b. Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris.....	62
c. Susunan Organisasi Majelis Kehormatan Notaris.....	63
7. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi.....	63
a. Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.....	65
b. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.....	65
c. Kedudukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.....	66
d. Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Majelis Pengawas Daerah Notaris.....	68
B. Teori Hukum.....	71
1. Teori Kewenangan.....	72
2. Teori Pertanggungjawaban Hukum.....	77
3. Teori Perlindungan Hukum.....	79
4. Teori Kepastian Hukum.....	82
C. Penelitian Yang Relevan.....	85
D. Kerangka Berpikir.....	87

BAB III. METODE PENELITIAN.....	90
A. Metode Penelitian.....	90
1. Jenis Penelitian.....	92
2. Sifat Penelitian.....	93
3. Pendekatan Penelitian.....	93
4. Jenis Bahan Hukum Penelitian.....	94
5. Sumber Bahan Hukum Penelitian.....	94
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	97
7. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	97
 BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 99
A. Perlindungan Hukum dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Hal Pemeriksaan Oleh Penyidik Setelah Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.....	99
B. Konsistensi Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-X/2012.....	116
 BAB V. PENUTUP.....	 126
A. Kesimpulan.....	126
B. Implikasi.....	127
C. Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

**FUNGSI DAN KEDUDUKAN MAJELIS PENGAWAS
DAERAHNOTARIS SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS NOMOR 30 TAHUN
2004**

Oleh : Anna Sari Dewi. S351208004.2016

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum Majelis Pengawas Daerah Notaris bagi Notaris dalam hal pemeriksaan oleh penyidik setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan untuk mengetahui konsistensi Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 bagi Majelis Pengawas Daerah Notaris ditinjau dari peraturan perundang-undangan.

Untuk mencapai tujuan dipergunakan penelitian hukum kepustakaan yang bersifat Yuridis Normatif. Sumber bahan yang dipergunakan adalah sumber bahan primer berupa peraturan perundang-undangan serta sumber bahan sekunder yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, serta dipergunakan bahan hukum tertier.

Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan terhadap bahan primer yang terlebih dahulu diteliti. Analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah Content Analysis.

Dari hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, Majelis Pengawas Daerah Notaris kehilangan kewenangan khususnya. Berdasar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Majelis Pengawas Daerah Notaris hanya mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pejabat Notaris. Didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dibentuklah Majelis Kehormatan Notaris yang menggantikan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris untuk melakukan pembinaan terhadap Notaris

Adanya konsistensi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 66 bagi Majelis Pengawas Daerah Notaris. Dari permasalahan tersebut seharusnya Notaris dalam menjalankan profesinya harus berpegang teguh pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Profesi Notaris, serta perlu membuat peraturan yang lebih jelas dan terperinci agar Notaris dapat terlindungi.

Kata Kunci : Notaris, Majelis Pengawas Daerah, perlindungan hukum

**FUNCTION AND POSITION OF REGIONAL SUPERVISORY
ASSEMBLY OF INDONESIAN NOTARIES FOLLOWING THE
ENACTMENT OF LAW NUMBER: 2 OF 2014 CONCERNING
AMENDMENT TO LAW OF NOTARY PROFESSION NUMBER : 30 OF
2004**

By: Anna Sari Dewi. S351208004. 2016

ABSTRACT

The objectives of this research are to investigate: (1) the legal protection for Notaries by the Regional Supervisory Assembly of Indonesian Notaries in case of investigation by investigators after the enactment of Law Number: 2 of 2014 about The Amendment to Law Number 30 of 2004 regarding Notary Profession, and (2) the consistency of Article 66 Paragraph (1) of Law Number : 2 of 2014 regarding Notary Profession following Verdict of Constitutional Court Number: 49/PUU-X/2012 for Regional Supervisory Assembly of Indonesian Notaries viewed from the prevailing legislations

This research used the juridical and normative library law research. The law material sources were primary, secondary, and tertiary ones. The primary law material sources were the prevailing legislations, and the secondary ones included explanations of primary law materials. The data of research were collected through the library research and analyzed by using the content analysis

The results of the research are as follows : 1) Following Verdict of the Constitutional Court Number: 49/PUU-X/2012, the Regional Supervisory Assembly of Indonesian Notaries loses its special authority. In accordance with Law Number: 2 of 2014, the Regional Supervisory Assembly of Indonesian Notaries only has authority to supervise the Notary officers. In Law Number: 2 of 2014 the Honorary Assembly of Indonesian Notaries is formed, which replaces the authority of the Regional Supervisory Assembly of Indonesian Notaries to conduct the training to Notaries. 2) There is consistency of Article 66 of Law Number: 2 of 2014 for the Regional Supervisory Assembly of Indonesian Notaries. Thus, the Notaries in performing their profession must hold on the Law of Notary Profession and Ethical Code of Notary Profession and need to make clearer and more detailed rules to protect the Notaries.

Keywords: *Notary, the Regional supervisory Assembly of Indonesian Notaries, legal Protection.*